

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL (BAPANAS) DI KELURAHAN
KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

Muhammad Rayhan Yuda Atmaja
NPP.32.0291

Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: muhammadrayhan.yudaatmaja@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Cut Laila Karmila, S.Sos., M.A.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The problem that underlies the researcher's choice of this title is the high poverty rate and food insecurity rate in Kedamaian Village.*

Purpose: *to analyze and describe the policy implementation of the National Food Agency food assistance program (BAPANAS) in Kedamaian Village, Bandar Lampung City.*

Methods: *using qualitative research methods with a descriptive approach. The data collection technique used is data triangulation which includes interviews, observation and documentation as well as techniques with data analysis techniques including collection, filtering / reduction, data presentation and conclusion or conclusion.*

Results/Findings: *The findings obtained are in accordance with all indicators in the Content of Policy and Context of Policy dimensions where the types of benefits, degree of change, response of program implementers, characteristics of institutions, regimes and resources deployed have shown positive results, but there are still several inhibiting factors from the implementation of the policy, including the condition of goods that are not prime, data that is not updated, the emergence of social jealousy in the community and lack of human resources in the implementation process.*

Conclusion: *based on the results found, the National Food Agency Food Assistance Program Policy in Kedamaian Village, Bandar Lampung City has been implemented properly according to Merilee Theory. S Grindle, in addition to the government as a stakeholder and policy actor providing attention and support, the community also participated in supporting the succession of this policy.*

Keywords: *Implementation, Poverty, Food Insecurity, National Food Aid, Government Rice Reserves (CBP)*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil judul ini ialah tingginya angka kemiskinan dan angka kerawanan pangan di Kelurahan Kedamaian. **Tujuan:** untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program bantuan pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung. **Metode:** menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni triangulasi data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi serta teknik dengan teknik analisis data meliputi pengumpulan, penyaringan/reduksi, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau *conclusion*. **Hasil/Temuan:** temuan yang diperoleh telah sesuai dengan seluruh indikator pada dimensi *Content of Policy* dan *Context of Policy* dimana jenis manfaat, derajat perubahan, respon pelaksana program, karakteristik lembaga, rezim serta sumber daya yang dikerahkan telah menunjukkan hasil yang positif namun tetap terdapat beberapa faktor penghambat dari implementasi kebijakan tersebut diantaranya kondisi barang yang tidak prima, data yang tidak terbaharukan, munculnya kecemburuan sosial di masyarakat dan kurangnya SDM dalam proses Implementasi. **Kesimpulan:** berdasarkan hasil yang ditemukan, Kebijakan Program Bantuan Pangan Badan Pangan Nasional di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung telah terimplementasi sebagaimana mestinya menurut Teori Merilee. S Grindle, selain pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan pelaku kebijakan memberikan perhatian dan dukungan, masyarakat juga turut berpartisipasi mendukung suksesti dari kebijakan ini. **Keywords:** Implementasi, Kemiskinan, Rawan Pangan, Bantuan Pangan Nasional, Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dan mendistribusikan pangan pokok untuk menjamin hak masyarakat atas pangan yang layak (Ariesta & Nugroho, 2023). Tugas ini juga mencakup peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan rentan agar terpenuhi hak atas pangan yang layak dan bergizi.

Tabel 1.1
Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang dan Berat,
Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Persen)

38 Provinsi	Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (Persen)	
	2023	
ACEH		4,70
SUMATERA UTARA		5,19
SUMATERA BARAT		5,74
RIAU		3,42
JAMBI		3,56
SUMATERA SELATAN		4,42
BENGGULU		4,23
LAMPUNG		5,12

Sumber : diolah dari data bps.go.id

Provinsi Lampung sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Sumatera menjadi perhatian dalam hal ketahanan pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Lampung mencapai 11,11% atau sekitar 970,67 ribu jiwa pada tahun 2023, dan hanya mengalami penurunan kecil pada tahun 2024 menjadi 941,23 ribu jiwa. Di sisi lain, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat di provinsi ini juga tergolong tinggi, yaitu sebesar 5,12%, di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 4,50% (BPS, 2024).

Program Bantuan Pangan dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan kerawanan pangan melalui penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 10 kg per bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata dalam DTKS. Walaupun menurut del Nino (2007), bantuan pangan bukan satu-satunya, atau bahkan bukan cara yang paling efisien dalam mengatasi kerawanan pangan. Implementasi program ini masih menghadapi tantangan seperti kualitas beras yang kurang baik, data penerima yang tidak akurat, kecemburuan sosial, dan keterbatasan SDM, sehingga diperlukan evaluasi berkelanjutan agar bantuan benar-benar efektif dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat (Munker & Walter, 2001; Hardianto, 2017). Bantuan pangan yang efektif memerlukan tata kelola yang baik untuk meningkatkan keamanan pangan dan gizi di negara-negara berkembang" (Cassimon, et. al, 2023)

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan program bantuan pangan dari BAPANAS di Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, yang merupakan salah satu wilayah dengan 3.082 KPM tercatat sebagai penerima bantuan. Kebijakan adalah tindakan pemerintah, baik dalam arti sempit maupun luas, sehingga disebut juga sebagai kebijakan publik atau kebijakan negara (Abdoellah & Rusfiana, 2016). Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta mengadopsi teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle. Teori ini menilai implementasi berdasarkan dua dimensi utama: *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Context of Policy* (konteks implementasi). Dimensi isi kebijakan mencakup aspek-aspek seperti manfaat, pelaksana, dan sumber daya, sementara dimensi konteks menilai kekuatan aktor, karakteristik institusi, hingga responsivitas pelaksana kebijakan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan yang melatarbelakangi penelitian ini terletak pada belum optimalnya implementasi Program Bantuan Pangan dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) di tingkat lokal, khususnya dalam hal ketepatan sasaran, kualitas bantuan, serta efektivitas distribusi. Meskipun kebijakan ini dirancang secara nasional dan memiliki prosedur teknis yang terstruktur, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai harapan akibat data penerima yang tidak terbarukan, terbatasnya sumber daya manusia, hingga munculnya kecemburuan sosial di masyarakat. Aspar et al. (2020) menemukan bahwa meskipun program BPNT terlaksana cukup baik, masih terdapat ketidaktepatan sasaran dan akses masyarakat terhadap e-warung yang belum merata, menunjukkan pentingnya validasi data dan kesiapan infrastruktur. Penelitian sebelumnya umumnya lebih menyoroti aspek bantuan pangan dalam skala makro atau menggunakan pendekatan kebijakan berbeda, sedangkan studi ini menekankan pada implementasi kebijakan di level kelurahan dengan menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi hambatan dan strategi penyelesaiannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks kebijakan program bantuan pangan nasional. Penelitian Moehammad Izzan Ismail Rangkuti pada tahun 2024 yang berjudul Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Medan menurut teori implementasi Edward III secara umum sudah berjalan dengan baik, namun pemerintah perlu melakukan evaluasi yang mendalam terkait dengan implementasi, pengoptimalan dan upaya mengatasi faktor penghambat kebijakan tersebut (Rangkuti, 2024). Penelitian selanjutnya yang berjudul *Collaborative Governance* Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Palembang oleh Alvita Cindy Wijaya menemukan bahwa setiap pemangku kepentingan saling bekerja sama untuk membantu keberhasilan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang. Terdapat 2 faktor pendukung yaitu kerja sama setiap pemangku kepentingan dan dorongan dari pemimpin untuk membantu keberhasilan program Terdapat 2 faktor penghambat yaitu Sarana Prasarana yang belum memadai dan pendataan yang belum dilaksanakan dengan maksimal untuk membantu keberhasilan program (Wijaya, 2024). Kemudian, Penelitian Mikhael Juan Nudu menemukan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam pelaksanaannya berhasil memenuhi 4 prinsip dasar pemberdayaan masyarakat yang meliputi Prinsip Kesetaraan, Prinsip Partisipasi, Prinsip Kemandirian dan Prinsip Berkelanjutan (Nudu, 2023).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Petrus Fian Beribe, pada tahun 2023 menemukan bahwa pelaksana kebijakan program sembako melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dari dimensi standar dan tujuan kebijakan telah sesuai dengan peraturan yang ada, dari aspek Penelitian terkait dengan Bantuan

Pangan Non Tunai Fokus pada penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn. Sedangkan peneliti menggunakan teori Grindle. Lokus dari penelitian ini ialah di kecamatan Larantuka Kabupaten 28 sumber daya kebijakan, karakteristik antar lembaga, komunikasi antar lembaga dan sikap para pelaksana kebijakan belum berjalan secara optimal. Aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat mendukung dan merasa terbantu dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Beribe., 2023). Kemudian penelitian terakhir yang dilakukan oleh Mukhammad Aji Pamungkas pada tahun 2023 menemukan bahwa proses implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNTD) di Kabupaten Mojokerto telah berjalan dengan baik namun, pemerintah perlu mengevaluasi beberapa faktor penghambat seperti BPNT yang masih menggunakan APBD serta pembagian keuangan/anggaran keuangan BPNTD untuk KPM yang belum optimal (Pamungkas, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan program bantuan pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) di tingkat kelurahan. Selain itu, dimensi dan indikator yang difokuskan dan digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Merilee S. Grindle (1980) yang memberikan perspektif baru dengan menelaah bagaimana dimensi *Content of Policy* dan *Context of Policy* memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi di Kelurahan Kedamaian. (Grindle, 1980). Adapun Lokasi yang menjadi fokus penelitian juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 terkait implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai (BPNT) (rangkuti, 2024) menggunakan teori Edward III dan objek penelitian tersebut merupakan program/kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Medan. Begitu juga dengan penelitian tentang collaborative governance BPNT dikota Palembang oleh (Wijaya, 2024) hal ini menunjukkan kebaruan dari penelitian ini yang menggunakan teori Implementasi oleh Merilee. S. Grindle serta objek yang diteliti merupakan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dalam hal ini Badan Pangan Nasional (BAPANAS)

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan program bantuan pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) di kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung, untuk menganalisis dan mendeskripsikan Faktor Penghambat dari Implementasi kebijakan program bantuan pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) di kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung, dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Upaya mengatasi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan program bantuan pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) di kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait implementasi kebijakan program bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) di Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah, dan juga dikenal sebagai metode etnografi karena awalnya digunakan dalam studi antropologi budaya. Disebut kualitatif karena data yang dikumpulkan dan dianalisis bersifat deskriptif, bukan angka (Nurdin, 2019). Ibrahim (2015) menuliskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan mendeskripsikan kondisi objek yang tengah diteliti dan sejalan dengan keadaan ketika penelitian dilaksanakan.

Dalam penelitian kualitatif di bidang pemerintahan, teknik pengumpulan data umumnya mirip dengan penelitian sosial, yakni melalui wawancara, observasi, dokumentasi, focus group discussion (FGD), dan triangulasi. Meskipun setiap teknik bisa digunakan secara terpisah, umumnya semua teknik tersebut diterapkan secara bersamaan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif (Simangunsong, 2017). Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, dengan pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dan *snowball* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap program yang berjumlah 5 orang. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator dari teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2017), untuk menghasilkan gambaran menyeluruh tentang proses implementasi, hambatan, dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan setempat. Penelitian dilaksanakan sejak tanggal 6 – 25 Januari 2025 di Kelurahan Kedamaian beserta Dinas Pangan Kota Bandar Lampung beserta Kanwil BULOG Lampung

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Bantuan Pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) di Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung

Pada penelitian implementasi bantuan pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS), analisis dalam penelitian ini menggunakan teori dari Marilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua dimensi besar, yakni *Content of Policy* dan *Context of Policy*. Kedua dimensi ini menjadi indikator utama dalam melihat sejauh mana implementasi bantuan pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) di Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan dimensi yang telah diuraikan tersebut maka peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari para informan yang berpartisipasi dalam rangka implementasi bantuan pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) di Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, yang dikaitkan dengan menggunakan teori Marilee S. Grindle sebagai pisau analisis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Content of Policy*

a. *Interest Affected (Kepentingan yang Mempengaruhi Kebijakan)*

Indikator ini dapat dimaknai bahwa suatu kebijakan tentunya tidak akan terlepas dari banyaknya kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang mencakup kerawanan pangan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah pusat maupun daerah memiliki kepentingan untuk menekan angka kemiskinan didaerahnya masing – masing dan masyarakat sendiri berkepentingan untuk menerima bantuan tersebut sebagai pemanfaat bagi diri dan keluarganya. Maka, indicator ini menjadi indicator yang krusial melihat apa saja kepentingan yang dibawa pemerintah pusat maupun daerah.

Tabel 3.1

Data Total Penerima bantuan Pangan (PBP) Kota Bandar Lampung



NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL PBP JANUARI 2024	TOTAL PBP DESEMBER 2023	BERTAMBAH /BERKURANG
1	Kedaton	3.608	2.866	742
2	Way Halim	2.803	2.866	63
3	Sukarame	1.585	2.122	537
4	Sukabumi	3.359	3.176	183
5	Kedamaian	3.080	1.977	1.103
6	Enggal	1.154	1.197	43
7	Tanjung Senang	2.305	1.413	892
8	Labuan Batu	1.350	1.439	89
9	Rajabasa	2.447	1.914	533
10	Kemiling	4.228	3.586	642
11	Langkapura	2.257	1.913	344
12	Tanjung Karang Barat	4.443	4.330	113
13	Tanjung Karang Pusat	3.334	3.935	601
14	Teluk Betung Utara	3.222	3.406	184
15	Tanjung Karang Timur	2.054	2.699	645
16	Teluk Betung Selatan	2.706	3.805	1.099
17	Teluk Betung Barat	3.801	3.881	80
18	Teluk Betung Timur	4.503	4.400	103
19	Bumi Waras	4000	3.842	158
20	Panjang	5.577	6.530	953
Grand Total		61.816	61.297	519

Tahun 2023-2024 Sumber : dinas pangan kota bandar lampung & bulog wilayah lampung

Program ini secara langsung menysasar masyarakat miskin yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan Tabel 3.1, terdapat sebanyak 3.082 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Kedamaian yang tercatat menerima bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan memang diarahkan pada kelompok sasaran yang relevan dengan isu kemiskinan dan kerawanan pangan di kota Bandar Lampung.

b. Type of Benefit (Jenis Manfaat)

Bantuan yang diberikan pemerintah berupa beras 10 kg disetiap bulan per-6 bulan sekali dianggap sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang pengeluarannya didominasi oleh kebutuhan pangan.beras tersebut mengcover dana yang seharusnya digunakan

untuk membeli beras, kemudian dapat digantikan dengan pembelian lauk pauk maupun sayur. Hal ini juga didukung oleh data BPS bahwa beras menyumbang 21,84% dari garis kemiskinan di wilayah perkotaan, menandakan bahwa manfaat yang diberikan sangat strategis dalam membantu pengeluaran rumah tangga miskin.

c. *Extent of Change Envisioned (Derajat Perubahan)*

Meskipun belum menciptakan perubahan struktural jangka panjang, bantuan ini memberikan pengaruh signifikan secara langsung dalam meringankan beban kebutuhan pangan bulanan. Data penurunan angka kemiskinan Provinsi Lampung dari 970,67 ribu jiwa (2023) menjadi 941,23 ribu jiwa (2024) mendukung asumsi bahwa program ini turut berkontribusi terhadap tren perbaikan kesejahteraan. Selain itu, Masyarakat memberikan respon baik terkait pemberian bantuan ini karena sangat meringankan beban pengeluaran Masyarakat terlebih dalam pembelian bahan pangan makanan

d. *Site of Decision (Letak pengambilan Keputusan)*

Pengambilan keputusan terkait validasi data penerima dan proses distribusi dilakukan di tingkat pusat (BAPANAS). Artinya pemerintah pusat memiliki peran yang sangat krusial dalam kebijakan ini, namun pelaksanaannya didelegasikan ke Perum BULOG dan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung serta aparat kelurahan salah satunya yakni pelaksanaan verifikasi data serta proses pendistribusian yang dipegang langsung oleh pemerintah daerah. Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai target.

e. *Program Implementor (Pelaksana Program)*

Pelaksana dari kebijakan ialah pemerintah pusat sebagai pemangku kebijakan dan di lapangan terdiri dari Perum BULOG, Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, petugas kelurahan, RT/RW, Linmas dan Sukarelawan yang berasal dari masyarakat. Berdasarkan observasi dan wawancara, pelaksana cukup responsif dan memahami teknis distribusi, meskipun dihadapkan pada keterbatasan tenaga terlebih dalam proses bongkar angkut muat barang yang akan dibagikan.

f. *Resources Committed (Sumber Daya yang Dikerahkan)*

Bantuan logistik berupa beras berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Gudang BULOG, sementara sumber daya manusia di kelurahan masih terbatas. Sejumlah petugas di lapangan harus merangkap tugas lain, sehingga efektivitas distribusi tidak maksimal. Ini menjadi salah satu catatan penting dalam perbaikan ke depan. Koordinasi antar lembaga pemerintah sangat penting dalam memastikan efektivitas kebijakan keamanan pangan di negara berkembang" (Bozsik, et. al, 2022)

2. *Context of Policy*

a. *Kekuasaan (power), kepentingan (Interests) dan strategi dari para aktor yang terlibat (strategies of actors involved)*

Dalam implementasi kebijakan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan, pemerintah pusat dalam hal ini Badan Pangan Nasional memiliki power yang absolut, pengambilan segala keputusan serta mekanisme dan berbagai hal terkait seluruhnya dimiliki oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS). Namun, dalam pelaksanaan di lapangan BAPANAS berkoordinasi dengan seluruh elemen teratas hingga terbawah dalam hal ini RT/RW serta kepala lingkungan agar ketercapaian implementasi dapat berjalan sesuai dengan target. Selain itu Bapanas juga telah menyiapkan strategi preventif untuk mengatasi permasalahan yang nantinya dimungkinkan muncul dalam pelaksanaan di lapangan seperti mekanisme penggantian bantuan, Upaya ekstra dalam menjaga bantuan tetap dalam kondisi prima dan berbagai sumber daya yang disiapkan dan dikerahkan pada implementasi nantinya.

b. Karakteristik institusi (*Institution characteristics*) dan rezim yang berkuasa (*regim*)

Secara umum kebijakan penyaluran Cadangan Pangan Beras (CBP) di masa rezim presiden Joko Widodo didukung penuh sehingga program tersebut berjalan sebagaimana rencana dan semestinya. Bentuk dukungan dari rezim ialah dengan memberikan persetujuan pengeluaran anggaran/pagu untuk belanja beras Badan Pangan Nasional kepada Bulog serta hal lainnya yang terkait dengan Implementasi Kebijakan tersebut. Namun, pada saat pergantian rezim saat ini yang dipimpin presiden Prabowo Subianto sampai dengan akhir bulan Januari 2025 informasi yang 111 didapat oleh peneliti bahwa belum adanya bantuan yang diberikan hingga saat ini.

c. Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana (*compliance and responsiveness*)

Dalam proses Implementasi kebijakan ini, para pelaksana dari tingkat pusat hingga tingkat daerah khususnya di Kelurahan Kedamaian dan Kota Bandar Lampung menunjukkan respon yang sangat positif dimana masyarakat dan aparat kelurahan dengan suka dan rela saling bergotong royong antusias menyambut bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut disisi lain mereka juga tidak menunjukkan resistensi dan keluhan walaupun tidak diberikan honor untuk mengerjakan berbagai hal dalam Upaya implementasi kebijakan tersebut. Hal tersebut merupakan respon yang sangat positif kaitannya dengan suatu kebijakan.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Nasional (CBP) dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) di Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung telah berjalan cukup baik berdasarkan indikator dalam teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Pada dimensi content of policy, program telah menasar kelompok sasaran yang tepat, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan manfaat bantuan berupa 10 kg beras

setiap bulan dinilai membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Sementara pada dimensi context of policy, pelaksanaan program mendapatkan dukungan dari aktor lokal seperti aparat kelurahan dan RT/RW, meskipun masih terdapat tantangan koordinasi dan keterbatasan pelaksana teknis. Namun, di lapangan masih ditemukan beberapa hambatan, antara lain kualitas beras yang tidak prima, pendataan penerima bantuan yang belum terbaru, kecemburuan sosial antarwarga yang tidak menerima bantuan, serta terbatasnya sumber daya manusia dalam proses distribusi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun desain kebijakan sudah berjalan sesuai pedoman, implementasi teknis dan sosialnya masih menghadapi tantangan serius.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Rangkuti (2024) yang menilai bahwa pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Medan secara umum telah berjalan dengan baik berdasarkan teori Edward III. Namun, ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap upaya pengoptimalan pelaksanaan dan penanganan hambatan kebijakan. Senada dengan itu, Pamungkas (2023) dalam penelitiannya di Kabupaten Mojokerto juga menemukan bahwa implementasi BPNT berjalan sesuai tujuan, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek pendanaan dan distribusi anggaran yang belum optimal. Penelitian Wijaya (2024) di Kota Palembang memberikan penekanan pada keberhasilan program karena adanya kerja sama antarpemangku kepentingan dan dorongan dari pemimpin daerah, namun juga mencatat hambatan berupa sarana prasarana yang belum memadai dan ketidaktepatan data penerima—dua faktor yang juga ditemukan dalam studi ini. Sementara itu, Nudu (2023) mengkaji program BPNT dari perspektif pemberdayaan masyarakat dan menemukan bahwa program telah berhasil memenuhi empat prinsip dasar pemberdayaan, yaitu kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Hal ini juga tercermin di Kelurahan Kedamaian, di mana pelaksana program di tingkat RT/RW dan kelurahan menunjukkan partisipasi aktif dalam proses penyaluran bantuan. Beribe (2023) menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam meneliti implementasi BPNT di Kecamatan Larantuka, dan menyimpulkan bahwa standar dan tujuan kebijakan telah sesuai peraturan, namun komunikasi antar lembaga dan karakteristik pelaksana belum berjalan optimal, sebuah kondisi yang juga ditemukan dalam konteks penelitian ini.

Dua penelitian lain dari Aspar et al. (2019) dan Djaenal et al. (2021) turut menguatkan temuan ini. Aspar dkk. menyoroti ketidaktepatan sasaran dan kurangnya akses terhadap layanan distribusi di Kelurahan Bontoduri, Makassar. Ketidaktepatan data menjadi isu sentral yang juga ditemukan di Kelurahan Kedamaian, di mana masih terdapat masyarakat miskin yang tidak terdata sebagai penerima bantuan. Sementara itu, Djaenal dkk. menemukan bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga dan belum optimalnya pemantauan menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan bantuan pangan di Kelurahan Tosa, Kota Tidore. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian ini, terutama dalam hal kurangnya SDM dan pengawasan teknis di tingkat lokal.

IV. KESIMPULAN

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kebijakan Program Bantuan Pangan Badan Pangan Nasional di Kelurahan Kedamaian Kota Bandar Lampung telah terimplementasi sebagaimana mestinya menurut Teori Merilee. S Grindle, selain pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan pelaku kebijakan memberikan perhatian dan dukungan, masyarakat juga turut berpartisipasi mendukung suksesi dari kebijakan ini. Selain itu, kebijakan ini telah memberikan impact dan respon yang cukup baik dari masyarakat, selain meringankan beban masyarakat juga mengontrol stabilitas harga beras. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat suksesi dari kebijakan ini. Maka, pemerintah harus terus mengevaluasi secara berkala sehingga hambatan-hambatan yang hadir dapat diatasi sedini mungkin sehingga impact kepada masyarakat dapat dirasakan secara maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, Lokasi, dan biaya penelitian sehingga belum mampu menjangkau seluruh informan yang dibutuhkan. Penelitian hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar cakupan wilayah diperluas ke beberapa kelurahan atau kecamatan lain guna memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif terkait efektivitas implementasi program bantuan pangan di berbagai konteks lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Badan Pangan Nasional beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyukseskan selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y. & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Ariesta, Haura. & Nugroho, Fentiny. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Era Covid-19. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial: Vol. 24: No. 1, Article 1
<https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v24i1.1004>
- Aspar, Syakhrudin. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Jurnal Washiyah, 1(2), 305–325.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/washiyah/article/view/14522>
- Beribe, Petrus Fian. (2023). IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. Skripsi, IPDN.
- Bozsik, N., Cubillos, J. P., Stalbek, B., Vasa, L., & Magda. (2022). Food security management in developing countries: Influence of economic factors on their food availability and access. PLoS ONE. Vol. 17(7).

- <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271696>
- Cassimon, D., Fadare, O., & Mavrotas, G. (2023). The Impact of Food Aid and Governance on Food and Nutrition Security in Sub-Saharan Africa. *Sustainability*. Vol.15(2).
<https://doi.org/10.3390/su15021417>
- Djaenal, R., Kaawoan, J.E., & Rachman, I. (2021). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore*. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/34844>
- Hardianto, F. N. (2017). Kualitas Ketahanan Pangan dan Kemiskinan: Review Literatur dan Studi Empiris. *Ketahanan Pangan Dan Pengentasan Kemiskinan*, May, 514–522.
<http://repository.usd.ac.id/id/eprint/12740>
- Ibrahim, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Nino, C., Dorosh., & Subbarao. (2007). Food aid, domestic policy and food security: Contrasting experiences from South Asia and sub-Saharan Africa. *Food Policy*. Vol. 32(4), 413-435.
<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2006.11.007>
- Nudu, Mikhael Juan. (2023). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR*. Skripsi, IPDN.
- Nuridin, I. & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Penerbit Media Sahabat Cendekia
- Pamungkas, Mukhammad Aji. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KABUPATEN MOJOKERTO*
- Rangkuti, Moehammad Izzan Ismail. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA*. Skripsi, IPDN.
- Simangunsong, Fernandes. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. Alfabeta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012
- Wijaya, Alvita Cindy. (2024). *GOVERNANCE PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KOTA PALEMBANG*. Skripsi, IPDN.
- Yopi, L., Sadhana, K., & Widjajani, R. (2023). Implementation of Regional Non-Cash Food Aid Policy, Indonesia. *EAS Journal of Humanityies and Cultural Studies*. Vol.5(5).
<https://doi.org/10.36349/easjhcs.2023.v05i05.004>